

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi salah satu permasalahan serius, dimana total produksi sampah yang terus meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BAPPENAS(2010), terjadi stagnasi pengelolaan sampah, peningkatan pencemaran lingkungan hingga penurunan kualitas pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Apabila hal ini tidak segera diperbaiki maka akan sulit untuk memenuhi target MDG nasional persampahan, yaitu peningkatan skala pelayanan persampahan menjadi 75% pada tahun 2015.

Dalam beberapa kasus terdapat TPA yang berubah sistem pengelolaannya dari *sanitary landfill* kembali menjadi *open dumping* (pembuangan terbuka). Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (PU) (2013), 90% TPA di Indonesia masih menerapkan sistem pengelolaan *open dumping*. Berdasarkan UU No.18 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka dengan batas akhir tahun 2013. Hambatan utama dalam proses penutupan TPA dengan sistem *open dumping* adalah faktor dana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Malang mencapai 894.653 pada tahun 2012 (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, 2012). Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap produksi sampah. Semakin besar jumlah penduduk maka sampah yang dihasilkan juga semakin besar. Sebagian besar sampah Kota Malang diolah di TPA, oleh karena itu pertumbuhan produksi sampah Kota Malang memberi dampak pada meningkatkannya volume timbunan sampah di TPA Kota Malang yaitu TPA Supit Urang.

Pengelolaan sampah di Kota Malang ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) pada Dinas PU Kota Malang, yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke Tempat Akhir Pembuangan Sampah (TPA). Sesuai dengan Permen PU No. 21 Tahun 2006 tentang KNSP-SP, maka Kota Besar (termasuk Malang) dan Kota Metropolitan harus menerapkan sistem *sanitary landfill*. Sistem operasional TPA Supit Urang yang sedang diterapkan adalah *controlled landfill* atau semi *sanitary landfill* (Profil Kota Malang, 2012). Berdasarkan hal tersebut maka

Pemerintah Kota Malang berencana akan penataan TPA Supit Urang menjadi sistem *sanitary landfill* sepenuhnya dengan 3R. Pengembangan *sanitary landfill* dilakukan dengan perluasan lahan TPA yang awalnya 15 ha menjadi 25 ha. Hal ini sudah direncanakan dari tahun 2008 tetapi tidak ada tindak lanjut karena keterbatasan biaya.

Sektor informal merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian masalah persampahan di Indonesia. Pemulung memiliki andil dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Menurut penelitian Meidiana (2011) pemulung memiliki peran besar dalam mereduksi sampah sebanyak 12,8% untuk sampah kertas dan plastik. Hal ini dapat menjadi peluang untuk mengurangi volume sampah yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya pengelolaan TPA. Selain itu, kegiatan memilah dan menjual sampah anorganik oleh pemulung dapat menjadi sumber penghidupan bagi keluarga pemulung.

Dengan adanya keterlibatan pemulung dalam pemilahan sampah di TPA menjadi tantangan tersendiri karena tidak adanya manajemen dan kontrol secara khusus. Menurut penelitian yang dilakukan oleh SMECDA (2008) terjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran di TPA yang dapat mengancam keselamatan kerja yaitu pemulung mendekati alat berat yang sedang beroperasi, melakukan kegiatan yang mengganggu operasional truk dan alat berat, mendekati dan memasuki area kolam pengolahan lindi dan menyalakan api di TPA. Selain mengancam keselamatan, hal ini juga mengganggu operasional alat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi pengelolaan sampah di TPA dengan keterlibatan pemulung. Hal ini dilakukan dengan memajemen dan mengontrol aktivitas pemulung disamping memberikan akses untuk memilah sampah. Salah satu upaya dalam memajemen pemulung adalah melalui penyediaan lokasi dan pemberdayaan pemulung. Pemberdayaan pemulung diidentifikasi melalui faktor-faktor yang berpengaruh. Selain itu rekomendasi keterlibatan pemulung tetap memperhatikan persyaratan TPA agar sistem operasional TPA berjalan sesuai ketentuan dan keselamatan kerja pemulung lebih terjamin.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terdapat inkonsistensi pada klaim sistem operasional TPA Supit Urang, dimana berdasarkan wawancara dengan operator TPA sistem operasional yang diterapkan merupakan *semi sanitary landfill/controlled landfill*, sedangkan sistem operasional TPA Supit Urang menurut Perda kota Malang No. 4 Tahun 2011 masih berupa *open dumping*. Kedua informasi di atas juga tidak sesuai

dengan PP No. 26/2006 dimana Kota Malang sebagai kota besar seharusnya menggunakan sistem *sanitary landfill*.

2. Berdasarkan Profil Kota Malang tahun 2012, Biaya operasional dengan biaya penerimaan untuk pengelolaan sampah mengalami defisit per tahun mencapai Rp 499.038.000,00 dengan sistem operasional yang saat ini dijalankan. Penerapan *sanitary landfill* membutuhkan peningkatan biaya operasional yang dapat meningkatkan defisit.
3. Level Of Service persampahan di Kota Malang mencapai 56 %, sehingga masih terdapat 44% sampah yang belum diolah dengan baik. Faktor penghambat dalam peningkatan skala pelayanan di Kota Malang diantaranya ketersediaan alat angkut dan pekerja pengangkut sampah (Dedi, 2012).
4. Apabila terjadi peningkatan sistem pengelolaan menjadi *sanitary landfill* maka kegiatan pemilahan oleh pemulung harus dihapuskan, sedangkan untuk sistem controlled landfill akan terdapat pengontrolan terhadap kegiatan pemulung. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi 217 pemulung di TPA.
5. Tanpa adanya keterlibatan pemulung, maka volume sampah yang ditimbun di TPA akan lebih besar karena kurangnya sarana pengolahan sampah di TPA (Roni, 2013).
6. Terjadinya pelanggaran di TPA oleh pemulung yaitu berupa pembangunan tempat istirahat di atas sel aktif dan mendekati alat berat saat beroperasi (Roni, 2013).

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan sampah di TPA Supit Urang dengan keterlibatan sektor informal?” Guna menjawab rumusan masalah tersebut maka pertanyaan di bawah ini akan dijawab terlebih dahulu, yaitu:

- a. Bagaimana sistem operasional di TPA Supit Urang?
- b. Bagaimana kontribusi pemulung dalam pengelolaan sampah di TPA Supit Urang?
- c. Bagaimana manajemen pemberdayaan pemulung di TPA Supit Urang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian adalah merumuskan rekomendasi pengelolaan sampah di TPA Supit Urang dengan keterlibatan pemulung.

1.5 Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi meliputi ruang lingkup materi dan ruang wilayah studi.

1.5.1 Ruang Lingkup Materi Studi

Materi yang dibahas yaitu pengelolaan TPA Supit Urang dengan melibatkan pemulung, sebagai salah satu sektor yang berperan dalam pemilahan sampah. Pembahasan pertama adalah evaluasi sistem operasional TPA Supit Urang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh UNEP (2005) dalam Training Module “*Closing an Open Dumping and Shifting from Open Dumping to Controlled Dumping and to Sanitary Land Filling*” dan pembagian zonasi TPA sesuai Permen No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Kawasan di Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Untuk evaluasi sistem operasional, metode yang digunakan adalah membandingkan kondisi eksisting operasional TPA dengan kriteria *open dump*, *controlled landfill* dan *sanitary landfill* (UNEP, 2005), dimana terdapat pembatasan masalah yaitu tidak membahas adanya dampak lingkungan dan kesehatan terhadap TPA.

Tahap kedua yang dilakukan adalah menganalisis kontribusi pemulung terhadap pengurangan sampah serta menghitung manfaat pemilahan sampah secara ekonomi baik untuk pemulung maupun TPA. Dengan adanya keterlibatan pemulung terdapat manajemen dan kontrol pemulung agar kegiatan pemilahan tidak mengganggu operasional TPA. Manajemen dan kontrol terhadap pemulung dalam penelitian ini dilakukan dengan upaya pemberdayaan.

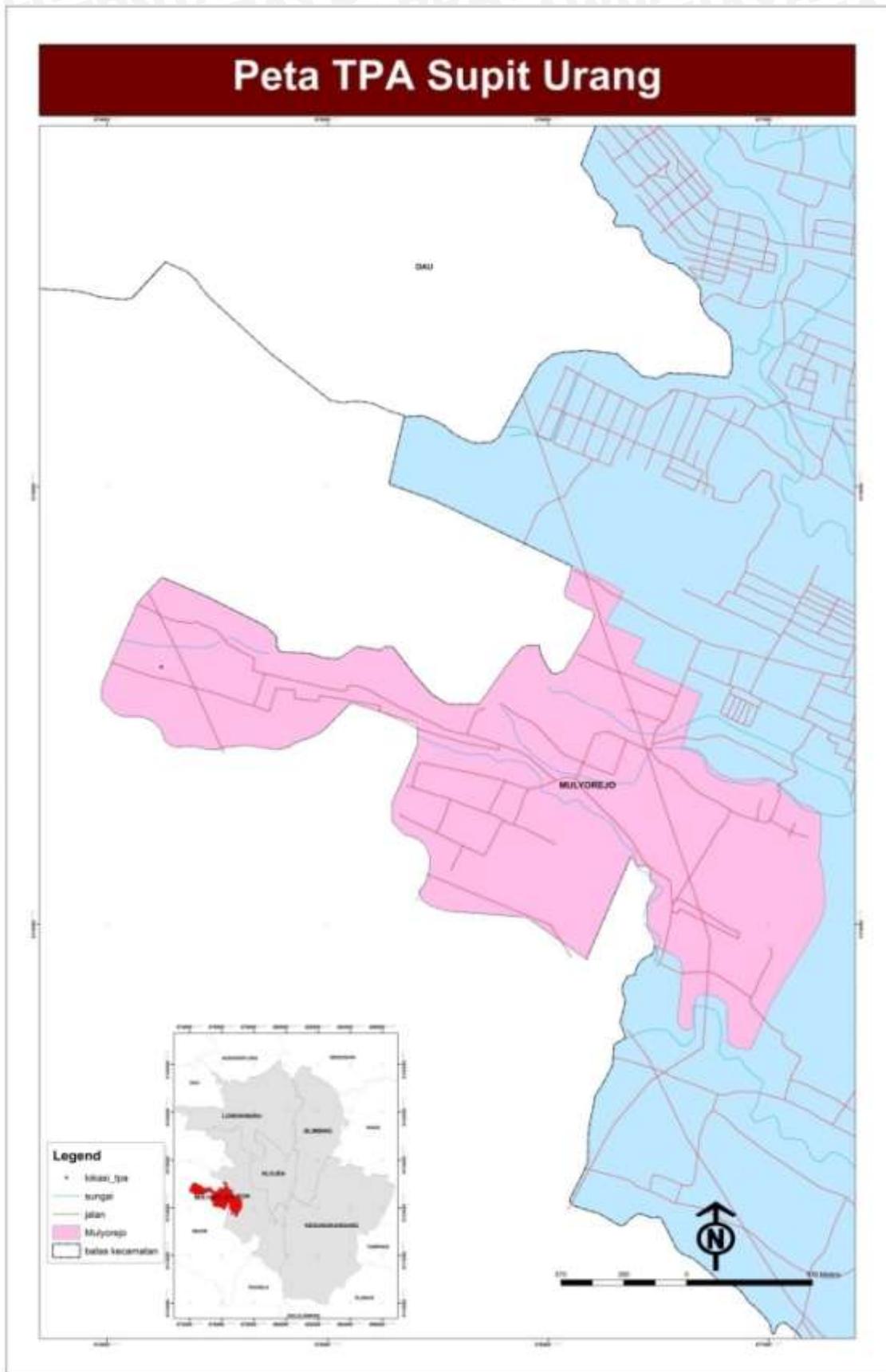
Manajemen pemberdayaan di bagi menjadi dua, yaitu dari segi pengelola TPA melalui peraturan zonasi, sedangkan dari segi pemulung dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan atau kemauan pemulung untuk diberdayakan. Faktor-faktor pemberdayaan pemulung menurut SMECDA (2008) dianalisis dengan analisis regresi logistik. Dari kedua analisis tersebut dapat dirumuskan rekomendasi keterlibatan pemulung dalam pengelolaan sampah di TPA.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Wilayah studi yang diambil adalah TPA Supit Urang yang terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun Kota Malang dimana para pemulung menjadikan TPA

sebagai lahan pekerjaannya. Lokasi TPA Supit Urang terlihat pada **Gambar 1.1**, dimana secara administrasi terletak di Kecamatan Sukun namun pada kondisi eksisting sebagian wilayahnya masuk dalam Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.





Gambar 1. 1 Peta Wilayah Studi

Sumber : BPN Kota Malang (2012) dan DKP Kota Malang (2013)

1.5.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi peningkatan pengelolaan sampah, dimana keterlibatan pemulung dapat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan baru bagi kalangan akademisi mengenai pengolahan sampah di TPA dengan melibatkan sektor informal sesuai dengan karakteristik sistem operasional.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dan peran pemulung dalam pengolahan sampah di TPA.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab untuk memperjelas lingkup dan cakupan penelitian. Bab-bab dan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisi teori-teori dan pedoman mengenai pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) khususnya mengenai penerapan, dampak sosial dan keterlibatan pemulung dalam operasionalisasi TPA.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan tentang metode-metode yang digunakan dimulai dari pengumpulan data hingga metode analisis.

BAB IV PEMBAHASAN

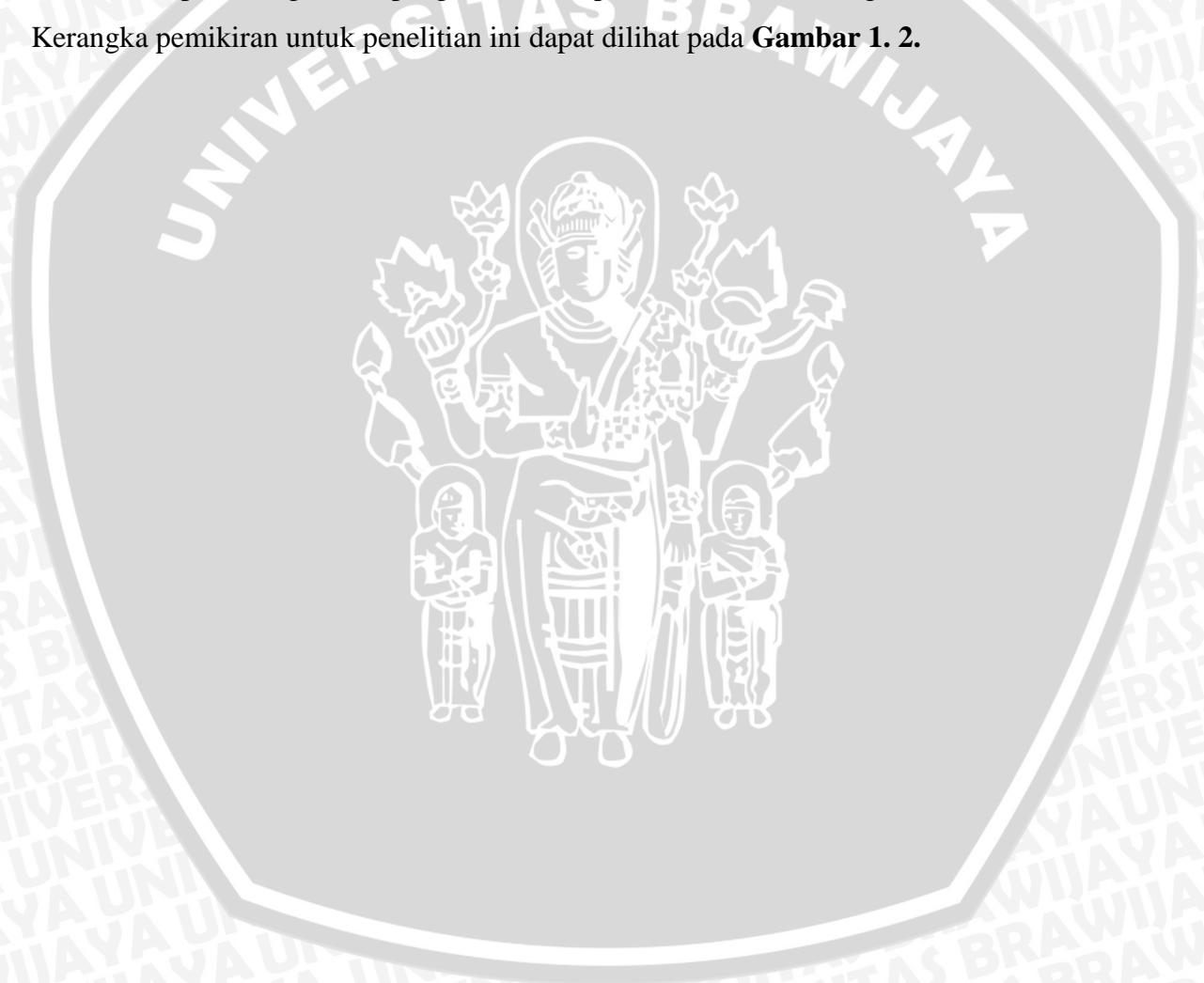
Pembahasan merupakan hasil dari penelitian sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ingin diteliti.

BAB V PENUTUP

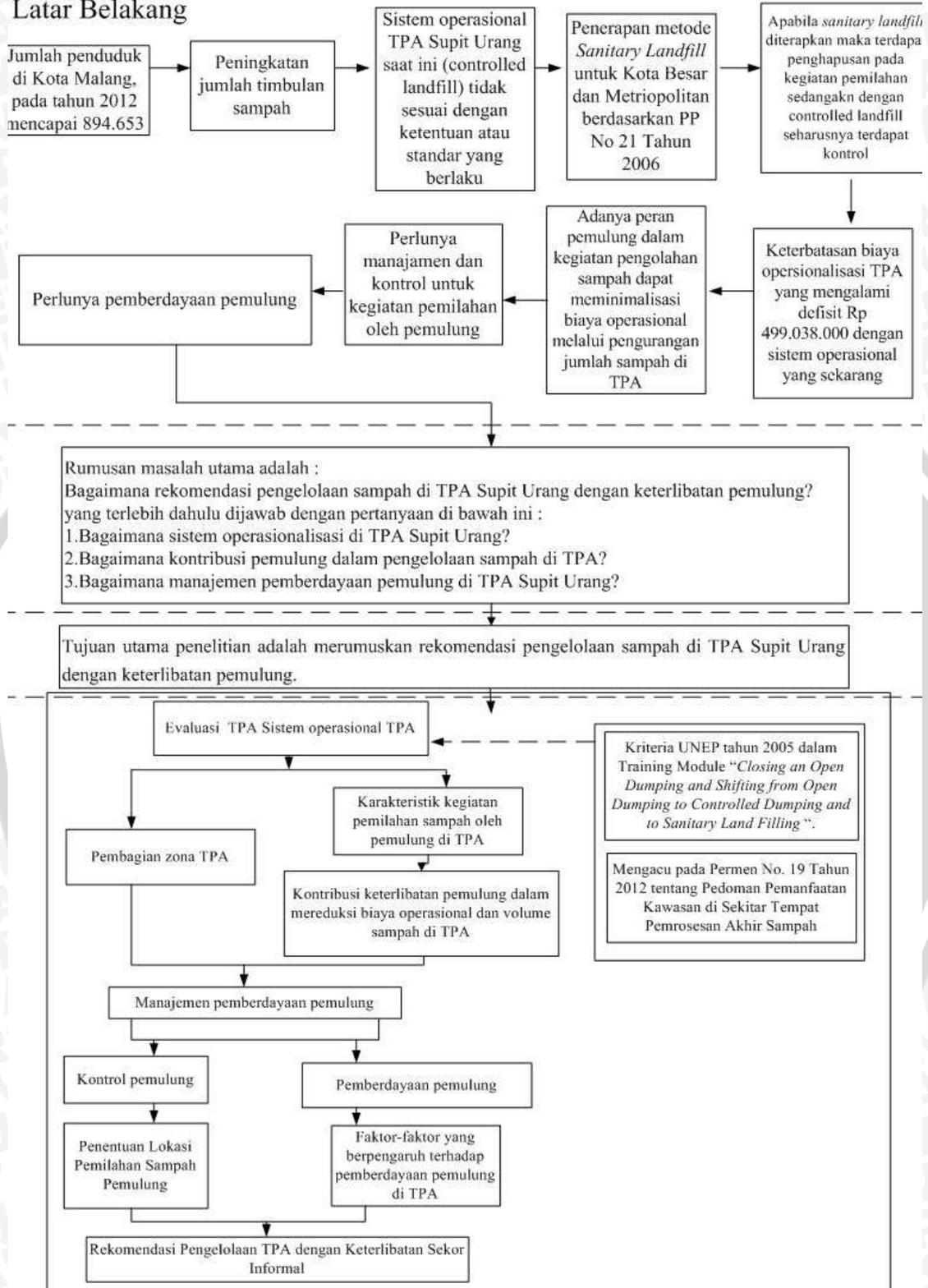
Penutup berisi tentang rangkuman hasil penelitian dan analisis secara keseluruhan, kesimpulan dan saran.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur pemikiran peneliti, dimulai dari latar belakang penulisan dan perumusan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan rumusan masalah maka dapat ditentukan lingkup materi yang dibahas, meliputi sistem operasional TPA dengan 13 kriteria UNEP (2005), identifikasi kontribusi pemulung dan identifikasi faktor pemberdayaan. Langkah terakhir adalah perumusan rekomendasi keterlibatan pemulung dalam pengelolaan sampah sesuai hasil dari tiga analisis tersebut. Kerangka pemikiran untuk penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 1. 2**.



Latar Belakang



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

